



News Title : Serapan Pasar Jadi Soal

Media Name : Bisnis Indonesia

Journalist : Mutiara Nabila, Nyoman Ary Wahyudi

Publish Date : 20 October 2022

Tonality : Positive

News Page : 14

News Value : 618,750,000

Resources : Ridwan Djamaluddin (Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)), Hedy Satria Putera (Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal BKPM), Andry Satrio Nugroho (Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Indef), Isa Djohari (Wakil Direktur Research and Development ICDX)

Ads Value : 206,250,000

Section/Rubrication : Korporasi

Topic : Timah

| RENCANA LARANGAN EKSPOR TIMAH |

SERAPAN PASAR JADI SOAL

Bisnis, JAKARTA — Rencana larangan ekspor timah batangan harus mempertimbangkan serapan oleh industri hilir di dalam negeri agar tidak makin menekan harga logam industri itu yang saat ini sudah merosot. Serapan oleh pasar luar negeri tak kalah penting.

Mutiara Nabila & Nyoman Ary Wahyudi
redaksi@bisnis.com

Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sekaligus Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ridwan Djamaluddin mengatakan serapan industri hilir untuk mengolah lebih lanjut balok timah (*tin ingot*) relatif belum optimal.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, penghiliran balok timah hasil penemuan di dalam negeri masih rendah, yakni baru 5%.

"Ini jadi PR paling besar ketika pelarangan ekspor *tin ingot* itu terjadi," katanya saat membuka *Indonesia Tin Conference 2022* di Jakarta, Rabu (19/10).

Jika stok timah menumpuk di dalam negeri, yang membuat harga anjlok, maka ekonomi Babel — provinsi yang menyumbang 90% ekspor timah—bisa terpukul. BPS merekam ekspor timah sepanjang Januari–Agustus US\$1,8 miliar atau 0,9% dari total ekspor Indonesia.

Dari sisi harga, timah sudah memasuki tren melemah pada paruh kedua tahun ini. Kontrak berjangka timah pengiriman November di London Metal Exchange tercatat US\$19.470 per ton pada Rabu (19/10) pukul 16.30 WIB, anjlok nyaris 60% dari puncaknya pada awal Maret—awal perang Rusia–Ukraina—dan hampir 49% dari posisi awal tahun.

Ridwan mengatakan Pemprov Babel dan Kem-

terian ESDM tengah mengkaji ulang tata niaga timah untuk mengetahui kondisi riil rantai pasok komoditas tersebut.

"Kalau ada yang diimpor, apa saja yang kita impor, siapa importirnya, siapa pengguna dalam negeri dari sana kita akan membuat rencana kalau nanti kita larang ekspor *tin ingot* agar proses ini bisa berjalan lancar," ujarnya.

Di sisi lain, dia juga menyoroti kendala spesifik terkait dengan pasar industri hilir *tin ingot* tersebut. Menurutnya, sejumlah produk hilir *tin ingot* yang terdapat di industri turunan seperti elektronik dan otomotif sudah memiliki jaringan rantai pasok tersendiri yang akan menyulitkan penetrasi ke pasar pada masa mendatang.

"Apakah kalau kita bikin *tin solder* di sini akan bisa diserap di pasar internasional. Marilah kita uraikan supaya nanti bila kita buat pabriknya, kita tetap bisa menjual," tuturnya.

Pemerintah kian getol membahas rencana larangan ekspor timah batangan yang dijadwalkan mulai tahun depan. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan rencana yang lebih detail tentang penyetoran ekspor timah, juga bakal di dan tembak akan diumumkan pada November 2022.

Ridwan meminta agar pelaku usaha untuk mulai menjajaki kesempatan konsorsium untuk berinvestasi lebih intensif pada pembangunan industri pengolahan lanjutan balok timah. Kementerian ESDM melaporkan produksi timah di dalam negeri mencapai 34.610 ton pada 2021. Adapun, tonase ekspor mencapai 28.250 ton atau 98% dari keseluruhan produksi saat itu.

Di sisi lain, Kementerian ESDM menargetkan produksi logam timah mencapai 70.000 ton pada 2022. Sementara realisasi produksi sudah mencapai 9.654,72 ton dan penjualan sudah menyentuh 9.629,68 ton per Mei 2022.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola serta perdagangan timah domestik seiring dengan rencana larangan ekspor.

Menurut rencana, audit itu berjalan selama 3 bulan sejak BPKP diberi tugas pada Agustus 2022. Sementara realisasi produksi sudah mencapai 9.654,72 ton dan penjualan sudah menyentuh 9.629,68 ton per Mei 2022.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola serta perdagangan timah domestik seiring dengan rencana larangan ekspor.

Menurut rencana, audit itu berjalan selama 3 bulan sejak BPKP diberi tugas pada Agustus 2022. Sementara realisasi produksi sudah mencapai 9.654,72 ton dan penjualan sudah menyentuh 9.629,68 ton per Mei 2022.

"Tujuannya untuk meluruskan apa yang tidak lurus," kata ungkapan Ridwan.

Merespons peringatan tentang serapan di hilir, Kementerian Investasi/BKPM melaporkan minat calon investor untuk menanamkan modal di industri hilir timah belakangan meningkat drastis.

Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal BKPM Hedy Satria Putera mengatakan minat investasi itu bakal berfokus untuk pengembangan produk akhir olahan *tin ingot* di tengah potensi limpahan komoditas itu di pasar domestik.

“Ini jadi PR paling besar ketika pelarangan ekspor tin ingot itu terjadi.”

Kami sudah melakukan penetrasi pasar, sudah cukup banyak calon investor yang tertarik untuk masuk ke dalam penghiliran timah ini. Konsepnya hilirisasi ini mesti menciptakan lapangan kerja dengan berkolaborasi dengan pelaku usaha nasional dan lokal,” kata Hedy.

BKPM telah menyusun peta jalan penghiliran timah, termasuk mengidentifikasi kegiatan ekspor dan impor industri timah domestik, serta potensi pengembangan produk hilir di daerah.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho menyarankan agar pemerintah sebaiknya menerapkan kebijakan larangan ekspor balok timah (*tin ingot*) secara bertahap.

Menurut Andry, disentif harga lewat instrumen tarif royalti timah yang berlaku progresif lebih realistis dilakukan di tengah kapasitas serapan industri hilir yang baru mencapai 5%.

“Misalnya yang selama ini royalti flat 3% itu kita naikan untuk ekspor timah batang mengikuti harga pasar. Pajak ekspor juga dikenakan. Itu bisa jadi disentif. Jadi, tidak langsung menutup ekspor,” kata Andry saat dihubungi.

BURSA TIMAH
Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berapac Indonesia bisa menjadi penentu harga timah dunia sebagai produsen timah terbesar kedua di dunia. Indonesia sejauh ini telah menerapkan pengaturan ekspor timah murni batangan melalui bursa berjangka.

Berdasarkan data Bappebti, total transaksi berjangka timah pada 2021 sebesar US\$2,4 miliar, naik 25,1% dari 2020. Adapun, volume transaksi timah 2022 sampai Agustus 2022 51.190 ton, meningkat 10,1% dari periode yang sama 2021.

Wakil Direktur Research and Development ICDX Isa Djohari mengatakan menambahkan keberadaan bursa berjangka dalam perdagangan timah penting agar harga komoditas itu tetap bisa bersaing dengan harga timah dunia, sehingga Indonesia bisa menjadi penentu harga global.

Kalau dulu sebelum ada bursa, harga di Indonesia jauh lebih rendah dari yang ada di global. Artinya, penerimaan penjual timah di Indonesia jadi lebih rendah.” Dengan peran bursa timah, harga di ICDX bisa sejalan dengan harga di LME, bahkan kadang lebih tinggi. □

